

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Partisipasi Petani

Pelaku utama (petani) adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarga yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan (Permentan, No. 82/Ot.140/8/2013).

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi dalam situasi kelompok sehingga dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi tersebut (Rodliyah, 2013). Sedangkan menurut Mardikanto (2013), partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti ini, terlihat selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus sosiologi. Bornby *dalam* Mardikanto (2013), menyatakan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan kegiatan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson *dalam* Mardikanto (2013).

Verhangen *dalam* Mardikanto (2013), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus di perbaiki
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri
- c. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dapat dilakukan
- d. Adanya kepercayaan diri. Bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Mardikanto (2013), juga menjelaskan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan dan menunjukkan partisipasi petani dalam kegiatan pembangunan melingkup:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, dalam banyak hal yang lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan diwilayah setempat atau tingkat lokal.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang diatasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih baik banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak di tuntutan sumbangannya secara proporsional.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam penentu tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka panjang.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pengembangan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi pemanfaatan dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program adalah partisipasi petani, hal ini bukan sekedar sumber inspirasi dan kreatifitas dalam pengembangan dan penciptaan suatu teknologi, melainkan yang terpenting dan terutama adalah sebagai penggunaan teknologi itu sendiri.

Kata kunci pengertian partisipasi pembangunan dalam masyarakat adalah kesukarelaan anggota masyarakat untuk terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, Dusseldrop *dalam* Mardikanto (2013) membedakan adanya beberapa bentuk partisipasi dalam jenjang kesukarelaan sebagai berikut:

- a. Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, keyakinan sendiri.
- b. Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
- c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-

- nilai, atau norma yang dibuat oleh masyarakat setempat. Jika tidak peran serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan oleh masyarakatnya.
- d. Partisipasi tertekan oleh sosial ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
  - e. Partisipasi tertekan oleh aturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

## **2. Penyuluhan Pertanian di Kostratani (Komando Strategis Pembangunan Pertanian)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa strategi pembangunan pertanian dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan' salah satunya dimulai dari perolehan data pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian dalam memperoleh data pertanian melalui pemenuhan prasarana dan sarana, serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian berbasis teknologi.

Komando Strategis pembangunan pertanian yang selanjutnya disebut Kostratan adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis Teknologi Informasi. Komando strategis petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.

Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pelaku utama bidang pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya. Pelaku usaha bidang pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kelembagaan ekonomi petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi secara real-time menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

Kostratani sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan, antara lain:
  - 1) Pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas.
  - 2) Penguatan pos penyuluhan desa.
  - 3) Penguatan Kelembagaan Petani dan KEP.
  - 4) Pengusulan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Pertanian.
  - 5) Fasilitasi pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha.
  - 6) Pendampingan, pengawalan, dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain varietas, benih atau bibit,

pupuk, obat-obatan, pakan, pola tanam, kalender tanam, pascapanen, rencana definitif kelompok tani (RDK) atau rencana delinitif kebutuhan kelompok (RDKK).

- b. Membentuk, mengawal, dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi.
- c. Melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian
- d. Melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya
- e. Menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Kostrada dan melalui Teknologi Informasi

Dalam hal kecamatan tidak terdapat BPP tetapi memiliki penyuluh pertanian, Kostratani berkedudukan di instalasi unit pelaksana teknis (UPT) Pusat. Dalam hal kecamatan tidak terdapat BPP, instalasi UPT pusat dan penyuluh pertanian, fungsi Kostratani dilaksanakan oleh Kostratani terdekat.

Implementasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kostratani adalah memantapkan penyuluhan pertanian yang terpadu dan modern berbasis Kostratani. Dukungan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di Kostratani adalah penguatan data dan informasi, mempermudah adaptasi teknologi, memperbaiki kelembagaan ekonomi petani dengan membangun skala ekonomi usaha berbasis kawasan, dan mengoptimalkan sekolah lapang sebagai paket pembelajaran.

BPPSDMP (2020), menyebutkan ada 4 implementasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kostratani yaitu sebagai berikut:

- a. Penguatan data dan informasi

Penguatan data yang dilakukan untuk mempermudah mengakses data dan informasi mengenai keadaan sebenarnya dilapangan, sehingga mempermudah dalam verifikasi dan validasi data. Penguatan data dan informasi dilakukan melalui Simluhtan dan *Cyber Ekstension*. Simluhtan (Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian) adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian pertanian yang menyajikan data dan informasi kelembagaan Penyuluh Pertanian, data ketenagakerjaan Penyuluh Pertanian, dan data kelembagaan petani. *Cyber Ekstension* merupakan sistem informasi penyuluhan pertanian melalui

media internet, untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis bagi pelaku usaha dan pelaku utama.

b. Adaptasi teknologi lokalita

Adaptasi teknologi dilaksanakan melalui desiminasi teknologi pertanian. Desiminasi teknologi pertanian diartikan secara praktis sebagai cara dan proses penyampaian hasil-hasil pengkajian teknologi kepada masyarakat atau pengguna untuk diketahui manfaatnya (Permentan No 20 tahun 2008).

c. Sekolah lapang

Sekolah lapang merupakan proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang ada sesuai dengan sumber daya yang ada secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usaha tani lebih efisien berproduktifitas tinggi dan berkelanjutan.

d. Kelembagaan ekonomi petani

Penguatan kelembagaan petani untuk bertransformasi menjadi kelembagaan usaha atau dengan pola kemitraan disinergikan dengan kegiatan pilot project 100 KEP pusat penyuluhan pertanian dengan kegiatan pengembangan korporasi petani. Kegiatan ini mendorong pergeseran perilaku dari produksi menuju agribisnis berbasis kawasan.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kostratani.**

**a. Kosmopolitan Pengurus Kelompok**

Menurut Yahya (2005), kosmopolitan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani, semakin tinggi kelompok tani berpartisipasi dalam penyuluhan pertanian maka semakin tinggi pula tingkat kemampuannya dalam memecahkan masalah. Menurut Harahap dan Arie (2014), menyatakan bahwa tingkat kosmopolitan, pengetahuan, sikap dan tututan sosial secara gabungan mempengaruhi partisipasi kelompok. Tingkat kosmopolitan merupakan tingkat hubungan atau tingkat interaksi seseorang dari “dunia luar” di luar sistem sosialnya. Tingkat kosmopolitan seseorang berdasarkan frekuensi mengadakan

kontak dengan orang lain diluar sistem lingkungannya (PPL, dinas pemerinta atau tokoh masyarakat) maaupun terhadap media informasi (koran, majalah, radio, dan televisi).

#### **b. Motivasi Pengurus Kelompok**

Febrimeli (2014), dalam pengkajiannya menyatakan bahwa motivasi untuk berpartisipasi karena kesadaran, yaitu partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul karena dari hati nurani sendiri. Keinginan untuk mencapai keadaan yang lebih baik mendorong seseorang untuk ikut aktif mencari informasi baru serta mengembangkan wawasan dan keterampilan pribadi. Motivasi masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi bermacam-macam. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat masyarakat terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung dan memberikan keuntungan kepada mereka. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi, mengatur mereka dalam kelompok dan masyarakat dan melibatkan mereka dan mereka dalam pengambilan keputusan adalah salah satu cara yang mencerminkan keinginan dasar masyarakat.

#### **c. Materi penyuluhan**

Materi penyuluhan pada hakekatnya merupakan segala pesan yang ingin di komunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat sasarannya, dengan kata lain materi penyuluhan adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam proses komunikasi penyuluhan. Apapun materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, hal pertama yang harus diingat bahwa materi tersebut harus selalu mengacu pada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sasarannya (Mardikanto, 2013)

#### **d. Kebijakan pemerintah**

Kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatannya dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan, atau tindakan pemerintah lainnya (Prayitno,2008). Dengan kebijakan pemerintah di harapkan mampu



memberikan dampak terhadap partisipasi kelompok tani terhadap program yang dijalankan untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Faktor faktor yang mendorong kelompok tani dalam berpartisipasi adalah sikap kelompok tani dalam kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Dua faktor tersebut mampu mendorong kelompok untuk mau mengambil bagian dalam kegiatan.

## B. Hasil Pengkajian Terdahulu

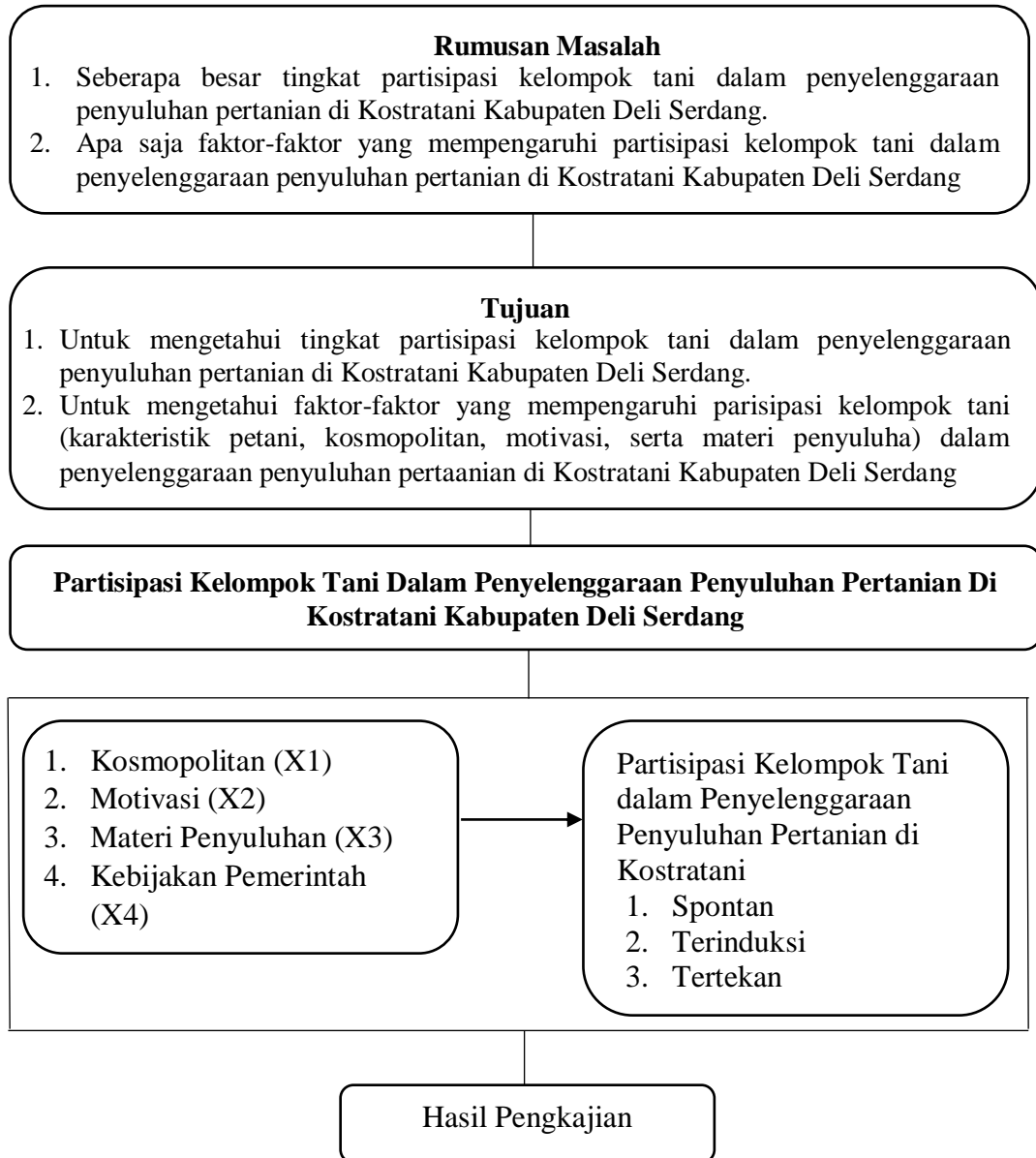
Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Kelompok Tani Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Kostratani Kabupaten Deli Serdang. Disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengkajian Terdahulu

NO	Judul/Tahun	Variabel Pengkajian	Hasil pengkajian
1	Partisipasi Petani dalam Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (UP2PJK) di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah (Shafira, 2017).	- Tingkat pendidikan formal - Kebijakan Pemerintah - Frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan - Motivasi petani - Kosmopolitan	Tingkat pengetahuan tentang program, frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan, tingkat motivasi petani, dan tingkat kekosmopolitan berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi petani dalam program UP2PJK. Sedangkan tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh nyata. Faktor yang paling berpengaruh dengan tingkat partisipasi petani padi dalam program UP2PJK adalah frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan.
2	Partisipasi Petani dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang (Mulidiawati. dkk, 2018).	- Produksi - Motivasi petani - Kosmopolitan - Sosialisasi program	Faktor-faktor yang berpengaruh dengan tingkat partisipasi petani dalam Program Upsus Pajale adalah produksi, kosmpolitan, dan intensitas sosialisasi program. Dan yang tidak berpengaruh adalah motivasi petani

### C. Kerangka Pikir

Sugiyono (2016), mengemukakan kerangka pikir adalah sebuah sintesa mengenai hubungan antar variabel yang telah dideskripsikan berdasarkan berdasarkan berbagai teori. Kerangka pikir bertujuan sebagai pondasi pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan kegiatan penelitian atau pengkajian yang akan dilakukan. Berikut merupakan kerangka pikir terhadap pengkajian yang akan dilakukan.



Gambar 1. Kerangka pikir Partisipasi Kelompok Tani Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Kostratani Kabupaten Deli Serdang